

**PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
MENGENAI PEMBUNUHAN BERENCANA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Islam (S.Hi) Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syari'ah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

**ANDI ABDUL RAHMAN
NIM :10300106006**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR 2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan Berencana” yang disusun oleh **Andi Abdul Rahman, Nim : 10300106006**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis 16 April 2013 M, bertepatan dengan 06 Jumadil Awal 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari’ah dan hukum, jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

16 April 2013 M.
Samata, _____
06 Jumadil Awal 1434 H.

DEWAN PENGUJI,

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Kasjim Salenda, SH, M.Th.I	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Usman Jafar, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Moh. Sabri, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ali Parman, M.Ag
NIP. 19570414 198603 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar 03 April 2013

Penyusun,

Andi Abdul Rahman

Nim : 10300106006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara andi abdul rahman nim: 10300106006 mahasiswa jurusan HPK, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul “Perbandingan Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan Berencana”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, 03 April 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Pro. Dr. Usman Jafar, M.Ag
Nip. 19580901 199102 1 001

Dr.Moh. Sabri, M.Ag
Nip. 19670714 199203 1 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian study pada Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan seperti karya ilmiah lainnya. Untuk itulah, penulis dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat konstruktif.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing HT., M.S., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Makassar
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Dekan dan para Pembantu Dekan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Drs. Hamzah Hasan, M.HI selaku Ketua Jurusan dan ibu Drs. Nila Sastrwati, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan HPK, atas bimbingan arahan dan kesabarannya dalam mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua program yang telah direncanakan.
4. Seluruh dosen beserta Pegawai Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Usman Jafar, M. Ag Selaku pembimbing I, dan bapak, Dr. Moh. Sabri, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Keluarga penulis yang telah banyak memberikan bantuannya sehingga penulis dapat memungkinkan menyelesaikan study.
7. Sahabat dan rekan mahasiswa, terutama pada angkatan '06 di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Terkhusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai serta mendoakan penulisan skripsi ini. Disamping itu, mereka mengajarkan kebenaran dan kejujuran kepada penulis serta bersikap tegas dan tegar dalam mengambil suatu kebijaksanaan, sehingga menjadi dukungan sprituan dan moral terhadap penulis sampai sekaran ini.

Mengingat bahwa sifat ilmu pengetahuan adalah dinamis dan akan terus mengalami perkembangan, sementara skripsi ini tidak dapat dikatakan sempurna maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Sebelumnya penulis memohon maaf bilamana terdapat kekurangan dan kesalahan lain yang tidak berkenan dihati.

Akhirnya, lebih dari segala kemuliaan, penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi Tuhan yang senantiasa membimbing jalan hidup ini untuk meraih segala kebaikan dan kepadanya penulis sandarkan segala pengharapan. Semoga dapat bermanfaat baik terhadap pribadi penulis terlebih kepada khalayak banyak dan menjadi suatu amalan jariyah yang tak ternilai harganya. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan begitu pula terhadap karya ilmiah ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi almamater, bangsa dan Negara. Amin.....

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 03 April 2013

Penyusun

Andi Abdul Rahman
Nim : 10300106006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKS	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan masalah	4
C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Tujuan dan kegunaan penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Positif	10
B. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Positif	16
C. Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Positif	23
D. Sanksi / Hukuman Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Positif ..	29
E. Dasar Hukum Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Positif	33

BAB III PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Islam	36
B. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam	40
C. Alat Bukti Dalam Hukum Islam	42
D. Sanksi / Hukuman Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam	50
E. Dasar Hukum Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam	55

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Islam Dan Pidana Positif	60
B. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam Tentang Pembunuhan Berencana	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA.....	78
----------------------------	-----------

ABSTRAKS

Nama Mahasiswa : Andi Abdul Rahman
NIM : 10300106006
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam
Mengenai Pembunuhan Berencana

Penelitian hukum ini bertujuan memahami pelaksanaan Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan Berencana. Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sedangkan dalam Islam pembunuhan berencana terdapat dalam surah Al Baqarah (2): 178 ‘hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar diyat kepada yang member keringanan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih’.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Dalam hal ini, metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis terhadap perkara pidana pembunuhan berencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan disemua sektor, baik dibidang ekonomi, sosial budaya maupun politik.

Seiring dengan keberhasilan pembangunan tersebut, berbagai pengaruh atau dampak menyertainya. Salah satunya dampak positif keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan rakyat, meningkatnya pelayanan dibidang hukum dan keamanan. Kemudian disisi lain dampak negatif pasti ada seperti terciptanya kesenjangan sosial, tingkat urbanisasi yang besar dan pengangguran yang tinggi.

Kesenjangan- kesenjangan tersebut cenderung menimbulkan kerawanan-kerawanan sosila yang mengarah pada perbuatan-perbuatan krminal, seperti perkosaan, penganiayaan pencurian dan pembunuhan serta masih banyak tindak kriminal lainnya.

Khusus masalah delik pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang oleh pembuat undang-undang yang secara sistematis diatur dalam pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP). Namun yang menjadi inti kajian dalam karya ilmiah ini, adalah kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan matinya orang lain dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Pelaku tindak pidana kejahatan tersebut, dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Oleh sebab itu, yang oleh pakar hukum pidana dan kriminologi sering menyebut sebagai hukum sanksi istimewa, karena ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma.

Penjatuhan atau ancaman pidana tersebut, merupakan suatu petaka bagi pelaku kejahatan yang merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) yang hanya dapat diaplikasikan jika usaha-usaha preventif sudah tidak berfungsi lagi. Jadi salah satu bentuk sanksi atau ancaman hukum yang paling berat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berlaku sampai sekarang adalah pidana mati terhadap pelaku kejahatan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (pasal 340 KUHP).¹

Kejahatan pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana akhir-akhir ini cukup mengganggu dan meresahkan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang merupakan gejala social, dengan berbagai bentuk dan motif yang berbeda dan korbannya rata-rata mati sadis.

Oleh karena itu, perbuatan yang dapat membahayakan terhadap jiwa atau anggota badan orang lain, seperti penganiayaan dan pembunuhan merupakan delik atau peristiwa pidana dalam istilah pidana positif.

Hukum islam merupakan kaidah dan peraturan yang bersifat universal tegas melarang untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu dan merugikan individu maupun kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara sebab perbuatan kejahatan dan pelanggaran tersebut, dapat menimbulkan dampak dan konsekuensi dan yang bersifat negative dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sebagaimana diharapkan oleh agama, bangsa dan Negara. Istilah delik atau peristiwa pidana dalam hukum Islam biasa disebut jarimah, namun para Fuqaha sering menggunakan dengan kata *Jinayah* atau *Jarimah*. Jinayah dilakukan fuqaha (pakar), Ahmad Hanafi (1990 : 1) mengartikan sebagai berikut :²

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP.

² Hanafi Ahmad, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa manusia, anggota badan atau harta benda orang lain, seperti membunuh, menganiaya, menggugurkan kandungan dan sebagainya.

Sedangkan dalam isitilah hukum pidana islam lebih dikenal dengan istilah JARIMAH, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT, dengan hokum Had atau hukuman Ta'sir. Namun para fuquha sering memakai kata JINAYAH untuk mengenai perbuatan terhadap jiwa atau nyawa orang lain, seperti membunuh, melukai memukul dan menggugurkan kandungan. Sehingga dalam hukum islam lebih mengkonfirmasi penetapan sanksinya dengan hukuman Qishash (pembalasan setimpal) terhadap pelaku penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi hukuman Qishash tersebut diterapkan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.

Delik atau tindak pidana kejahatan pembunuhan adalah suatu perbuatan moral yang dilakukan oleh seorang atau lebih (pembuat) dengan berbagai macam faktor untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan akhir-akhir ini kejahatan tersebut cenderung meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, delik pembunuhan ini, harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berwenang untuk kemudian dicarikan solusinya guna menjaga ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah selaku penggerak pembangunan dan aparat hukum sudah seharusnya mendayagunakan peranan hukum secara intensif dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang sebenarnya dan seadil-adilnya, baik itu menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa semua masalah atau problematik dalam kehidupan masyarakat harus didekati secara legistik (hukum), namun paling tidak peraturan-peraturan yang dimaksud dapat berfungsi sebagai sarana preventif dalam upaya mengurangi dan

menghindari teradinya tindak pidana dalam masyarakat, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok masalah yang coba penulis kaji disini adalah, bagaimana eksistensi kedua hukum tersebut mengenai pembunuhan berencana, yang menurut penulis dapat dijadikan wacana untuk dikaji secara mendalam, namun penulis dengan kemampuan yang serba terbatas coba mengangkat sub masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Apakah delik pembunuhan berencana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam dapat dijatuhkan pidana ?
- b. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap delik pembunuhan berencana ?

C. Pengertian Judul dan Definisi Operasional

Dalam penulisan Penelitian Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Ini akan banyak digunakan istilah dalam hukum dan bidang hukum Islam. Untuk menghindari kesimpangsiuran pengertian mengenai istilah yang dipakai dalam penulis ini, berikut dijelaskan definisi operasional dari istilah tersebut:

Hukum Pidana Positif adalah hukum materiil (hukum positif) yang mengandung norma-norma atau aturan-aturan tentang ancaman sanksi terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran yang mengenai kepentingan umum.

Hukum Pidana Islam atau *jinayah/jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam (Syara') yang mana larangan tersebut mengandung pidana yang sesuai atau setimpal dengan perbuatannya. Oleh sebab itu, dapat diinterpretasikan bahwa pembunuh wajib dibunuh atau "*qishash*".

Pembunuhan Berencana adalah pembunuhan biasa yang disertai dengan unsur pemberatan hukuman, yaitu adanya unsur perencanaan

Pembunuhan berencana menurut pidana positif Tindak kejahatan berupa membunuh, menghilangkan nyawa dan hak hidup orang lain secara terencana. Perencanaan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan waktu, bagaimana calon korban tersebut akan dihabisi serta mengatur hal-hal kecil yang berkaitan dengan pembunuhan, seperti penghilangan barang bukti.

Pembunuhan berencana menurut hukum islam disebut juga '*Al-Qatlul-'amdu*, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana membunuh seseorang, yang dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh seperti golok, senjata tajam, senapan, alat pemukul yang kuat, menenggelamkan ke dalam air, menahan dalam kurungan dan sebagainya.

D. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan baik terhadap referensi yang berupa tulisan para pakar dan para ahli serta Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), penulis sampai sekarang belum menemukan wacana atau pengkajian secara spesifik yang mengangkat topic atau membahas tentang (Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Mengenai Pembunuhan Berencana).³

Hal inilah yang kemudian memotivasi penulis untuk melakukan pengkajian secara ilmiah dan konstitusional, tinjauan umum terhadap pokok pembahasan dalam skripsi ini mengacu pada beberapa referensi berupa buku, dan data ilmiah lainnya yang dianggap memiliki sinergitas sebagaimana wacana yang dikaji serta sesuai dengan teori yang dikategorikan perlu untuk memperkuat wacana dominan dalam skripsi ini.

³ Abdurrahman al-maliki dan ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan hukum Pembuktian dalam Islam* (Cet, I ; Bogor ; Pustaka Thariqul Izzah 2004) h.127

Adapun referensi buku yang dianggap perlu sebagai rujukan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. System sanksi dan hukum pembuktian dalam Islam karangan Abdul al Rahman al Maliki dan Ahmad al Ad Daur, dalam buku ini, membahas tentang bagaimana system sanksi dan hukum pembuktian dalam islam terhadap kejahatan pembunuhan, serta perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi dalam setiap menentang perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Negara maupun dalam islam.

Salah satu kunci dari buku ini adalah keberhasilan system hukum islam dalam bidang peradilan adalah tegas dan adilnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan. Dalam system hukum ini kedudukannya sama seluruh masyarakat (termasuk khalifah) di depan hukum. Terdakwa maupun pendakwa mempunyai kesempatan yang sama untuk melontarkan argumentasi didalam sidang peradilan. Dan keputusan bersifat mengikat dan final.

2. Hukum Pidana di Indonesia, karangan Pipin Syarifin,S.H, buku ini membahas bagaimana mekanisme tentang pengaturan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta tindak pidana pembunuhan, dan pengertian hukum pidana di Indonesia. Buku ini tidak hanya mengkaji masalah hukum pidana tetapi juga membahas tentang norma dan sanksi hukum pidana positif di Indonesia dan cara pandang dalam melihat perbedaan antara kejahatan pembunuhan dan pelanggaran serta perbuatan-perbuatan pidana dalam system KUHP di Indonesia.
3. Pidana Islam Dalam Politik Hukum di Indonesia Karangan DR. Sabri Samin, MA merupakan salah satu dari sedikit buku ilmiah yang mengkaji tentang ihwal pidana dan pembedaan dalam islam dengan kajian yang bersifat spesifik dan mendalam. Dalam buku ini menyajikan metode dan pendekatannya yang secara dalam membanding-bandingkan (comparative study) antara teori pidana dalam konteks hukum pidana konvensional disatu

pihak dan teori fikih jinayah (hukum pidana islam) di pihak lain. Antara hukum pidana konvensional dan fikih jinayah memiliki sumber-sumber yang di per kaya dengan literature serta cukup memadai.

Buku ini, di samping menelusuri akar kesejarahan kehadiran pembedanaan dalam Islam itu dalam posisi dan proporsi yang tepat.

Inti dari isi buku ini membahas tentang perpaduan antara hukum pidana islam (fikih jinayah) dengan pidana umum (criminal law) dengan menekankan konsep pembedanaan (al-‘uqubah) dalam islam.

4. Kitab undang-undang Hukum Pidana oleh Prof. Moeljatno, S.H, buku pidana hukum dan perundang-undangan.⁴

Buku ini hanya menyajikan tentang perubahan dan penambahan oleh undang-undang tersebut, disusun dalam hukum induknya. Sehingga KUHP dapat dipakai di seluruh nusantara.

Beberapa referensi yang dikemukakan diatas, baik secara kelompok maupun secara perorangan tidak satupun yang membahas masalah pembunuhan berencana, atau ada yang membahasnya tetapi masih bersifat menganalisa. Sehingga dengan demikian, penulis merasa peduli untuk dalam tulisan ini.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan normative dengan menggunakan :

1. Teknik Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, pembahasannya digunakan perangkat-perangkat hukum yang bersifat formal, baik merupakan ketentuan-ketentuan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi maupun ketentuan dari Undang-Undang hukum

⁴ Prof. Moeljatno, S.H., Cet. 27., *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*, Jakarta; Bumi Aksara, 2008

pidana positif, dan peraturan-peraturan pemerintah yang ada relevansinya dengan obyek kajian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian melalui kepustakaan (library research), yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku dan bacaan-bacaan lainnya, baik dari peraturan hukum positif maupun hukum islam yang ada kaitannya dengan delik pembunuhan dalam hal ini pembunuhan berencana.

3. Teknik Analisa Data

Data dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu menganalisa data atau informasi yang berupa pendapat atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam bentuk rumusan yang disimpulkan berdasarkan metode-metode analisa serta cara berpikir ilmiah, logis dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data dan informasi yang ada diolah dengan menggunakan cara berpikir di bawah ini :

- a. Cara deduktif, yaitu suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan didasarkan pada kenyataan-kenyataan, gagasan ataupun norma-norma yang bersifat khusus.
- b. Cara Induktif, yaitu suatu cara berpikir dengan merumuskan kesimpulan secara khusus dengan berdasarkan pada hal-hal atau kaidah-kaidah yang bersifat umum, baik berupa gagasan, pendapat-pendapat maupun kaidah-kaidah.
- c. Cara Komparatif, yaitu suatu cara berpikir dengan merumuskan suatu kesimpulan dari hasil perbandingan atas beberapa pendapat atau definisi.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui delik pembunuhan berencana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dapat dijatuhkan pidana.
- b. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum Islam dalam hal delik pembunuhan berencana.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap delik pembunuhan berencana.
- b. Diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam hal perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap delik pembunuhan berencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

1. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu bentuk penderitaan. Jadi keistimewaan dalam hukum pidana, terletak pada daya pakasanya yang berupa sanksi atau ancaman pidana, sehingga memungkinkan hukum itu ditaati oleh setiap individu maupun subyek hukum lain.

Ancaman pidana yang ada dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk yang bersifat khusus, sebab sanksi yang diancamkan kepada pelaku/pembuat adalah kaidah-kaidah yang bersanksi penderitaan dan pasti dikenakan kepada pelaku atau pelanggar yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, denda ataupun sanksi-sanksi lain yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum.⁵

Kemudian maksud dari ancaman pidana tersebut adalah tidak lain hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks kehidupan duniawi.

⁵ Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kansil (1986 - 257) memberikan rumusan tentang hukum pidana sebagai berikut :

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Dari pengertian tersebut diatas, menurut hemat penulis bahwa hukum yang mengandung norma-norma yang baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dahulunya belum ada, melainkan norma-norma yang sudah ada yang dipertegas, yaitu dengan pelaku kejahatan dan pelanggaran.

Moeljatno (1993 : 1) menjelaskan sebagai berikut “

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan ;

- a) Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;*
- b) Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.*
- c) Dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang tersangka telah melanggar larangan tersebut.*

Muladi dan arif (1992 : 4) menyimpulkan pengertian hukum pidana sebagai berikut :

- a) Hukum pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b) Hukum pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang).
- c) Hukum pidana itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pidana itu adalah hukum materiil (hukum positif) yang mengandung norma-norma atau aturan-aturan tentang ancaman sanksi terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran yang mengenai kepentingan umum. Karena itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menganut suatu asas yang dikenal dengan nama asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan, sebagaimana yang termaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 1 sebagai berikut :

- a) Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu

⁶ Muladi dan B.N Arif, 1992, *Teori-teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Alumni, Bandung.hal 175

- b) Jikalau Undang-Undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan menguntungkan baginya.

Dengan adanya ketentuan peraturan tersebut diatas, hakim dalam menghukum orang terikat oleh undang-undang, sehingga terjaminlah hak kemerdekaan seseorang.

2. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Positif

Sebelum dikemukakan pengertian pembunuhan berencana menurut hukum pidana positif, terlebih dahulu diuraikan pengertian pembunuhan itu sendiri.

Pembunuhan menurut pengertian etimologinya berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan atau memadamkan api, atau membinasakan tumbuh-tumbuhan (poerwadarminta : 1986 : 169),⁷ sedangkan yang dibunuh adalah orang yang dihilangkan nyawanya atau orang yang meninggal dunia (mati.)

Poerwadarminta (1996 : 169) menyatakan bahwa, pembunuhan berarti perkara membunuh atau perbuatan membunuh. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain.

⁷ Poerwadariminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.hal. 402

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :

- 1) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
- 2) Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- 3) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- 4) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- 5) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
- 6) Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
- 7) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
- 8) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
- 9) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348);
- 10) Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349);
- 11) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Di lihat dari segi "kesengajaan" (*dolus*) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas:⁸

- 1) Yang dilakukan dengan sengaja,
- 2) Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat,
- 3) Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,
- 4) Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh,
- 5) Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh.

⁸ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1995), hal. 204.

Pembunuhan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana biasa disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam Buku II Bab XIX KUHP.

Soesilo (1986 : 207) merumuskan pasal 338 KUHP sebagai berikut : ⁹

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena maker mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dari rumusan pasal tersebut diatas Soesilo (1986 : 207) memberikan pengertian tentang pembunuhan sebagai berikut :

Pembunuhan adalah segala perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termaksud dalam niatnya.¹⁰

Berdasarkan dari pandangan dari pakar hukum pidana tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pembunuhan biasa atau pembunuhan yang disengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dengan sengaja, segera setelah timbul niatnya untuk membunuh dan tidak ada tenggang waktu untuk berpikir dengan tenang.

Sedangkan pembunuhan berencana adalah pembunuhan biasa yang disertai dengan unsur pemberatan hukuman, yaitu adanya unsur perencanaan.

Pembunuhan brencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang menurut Soesilo (1986 : 208) sebagai berikut :

⁹ Soesilo R. 1986, *KUHP dan Komentari Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.hal.249

¹⁰ Moeljatno, *KUHP, op.cit*, hlm. 21.

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

Dari rumusan pasal tersebut, Soesilo (1986 : 208) memberikan pengertian sebagai berikut “

“Direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempoh bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.

“*Tempoh*” ini tidak boleh terlalu lama, juga tidak perlu terlalu sempit yang penting ialah apakah di dalam tempoh itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk mebatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan.

Bertolak dari pengertian pembunuhan berencana tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan cara yang telah direncanakan lebih dahulu, dimana niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya terdapat suatu jarak atau tenggang waktu (*tempo*) untuk menimbang-nimbang dan berpikir dengan tenang bagaimana cara sipembuat akan melakukan pembunuhan yang sebenarnya ia dapat membatalkan niatnya untuk membunuh.

B. UNSUR-UNSUR PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM POSITIF

1. Unsur – unsur Yang Terdapat Dalam Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP : “ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut adalah :

Pasal 340 KUHP.

- (a). Barang siapa .
- (b). Dengan Sengaja
- (c). Dengan Direncanakan.
- (d). Menghilangkan Jiwa Orang Lain

Pasal 338 KUHP.

- (a). Barang siapa .
- (b). Dengan Sengaja
- (c). Menghilangkan Jiwa Orang Lain.

Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia. Menurut doktrin, tindak pidana melekat pada pelakunya. Manusia yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah siapa saja oleh orang dengan pengecualian yang diatur oleh beberapa pasal pada buku I aturan umum bab III, yaitu :

1. Alasan Pembenaar : daya paksa (pasal 48 KUHP), bela paksa (pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan UU (pasal 50 KUHP), dan perintah jabatan sah (pasal 51 ayat (2) KUHP)
2. Alasan Pemaaf : ketidakmampuan bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), Daya paksa dalam arti sempit (Pasal 48 KUHP), Bela paksa lampau batas (pasal 49 ayat (2) KUHP), dan perintah jabatan tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

Sengaja, Adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini disebut sebagai pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut, kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang –Undang itu ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain , sudah jelas dari uraian diatas bahwa tindak pembunuhan itu merupakan suatu delik material.

Menurut Moch Anwar (1989 : 93) Unsur –unsur yang terdapat dalam pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan pasal 340 KUHP tersebut sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif, yaitu menghilangkan jiwa seseorang dan dirancang terlebih dahulu
- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan sengaja

Dalam hal ini suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, misalnya memasukkan racun pada minuman, hal ini bukan termasuk bentuk aktif, namun termasuk bentuk abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu, dalam kenyataan yang kongkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti apa yang telah dicontohkan sebelumnya.

Perbuatan-perbuatan ini harus ditambah dengan unsur kesenjangan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagian tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Dan oleh karena itu, tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan diberi atau diberi kualitatif sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam pasal 338 yang dalam rumusannya

berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang bersifat obyektif dan subyektif, apabila kita perinci sebagai berikut:

- *Unsur obyektif:*

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa
2. Obyektif : nya orang lain

- *Unsur subyektif:*

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain .

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339, yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti. Disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain. Yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun

untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam pasal 338.
2. Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 - b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
 - c. Dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Kejahatan pasal 339, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini.

Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain ini ia belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan 339 tidak terjadi.

c. Pembunuhan berencana (moord)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Dari pasal tersebut, pembunuhan berencana terdiri dari unsur-unsur:

- Unsur subyektif:
 - 1) Dengan sengaja
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu
- Unsur Obyektif
 - 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
 - 2) Obyeknya : nyawa orang lain.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.V.T. pembentukan pasal 340, antara lain:

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya”.

d. Pembunuhan atas permintaan korban

Hal ini dimuat dalam pasal 344 yang berbunyi: *“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*

Dengan mengandung unsur:

- 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa.

- 2) Obyek: nyawa orang lain.
- 3) Atas permintaan orang itu sendiri.
- 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

Pembunuhan atas permintaan sendiri (344) ini sering disebut dengan euthanasia (mercy killing), yang dengan pidananya si pembunuh, walaupun si pemilik sendiri yang memintanya, membuktikan bahwa sifat publiknya lebih kuat dalam hukum pidana. Walaupun korbannya meminta sendiri agar nyawanya dihilangkan, tetapi perbuatan orang lain yang memenuhi permintaannya itu tetap dapat dipidana.

e. Penganjuran agar bunuh diri

Hal ini diatur oleh pasal 345 KUHP dengan sanksi hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

f. Pengguguran kandungan

Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata abortus provocateur yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran, pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348, dan 349. Unsur dalam pasal-pasal tersebut, yaitu:

- 1) Janin
- 2) Ibu yang mengandung
- 3) Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. Tujuan adanya pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin yang ada dalam kandungan si ibu.

C. ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

Di dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP)

Sedangkan yang dimaksud dengan barang bukti adalah barang-barang yang dapat menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana baik digunakan sebagai alat, hasil dari suatu kejahatan ataupun yang menunjukkan bekas telah terjadinya suatu tindak pidana. Gunanya barang bukti adalah untuk memperkuat alat-alat bukti yang sah.¹¹

Yang disebut “terbukti dengan sah dan meyakinkan” apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang bisa membuat Hakim yakin bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Berdasarkan hal tersebut maka syarat-syarat seseorang dapat dipidana apabila: (1) Ada alat bukti yang sah sekurang-kurangnya dua alat bukti; (2) Adanya keyakinan Hakim; (3) Adanya kesalahan yang didakwakan kepada dirinya (4) Yang bersangkutan dapat dianggap bersalah. Hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materiil wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang.

Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah : (1) Keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

a. Keterangan saksi;

Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan: Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian keterangan saksi sebagai alat bukti, dicantumkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang

¹¹ CST. Kancil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

pengadilan”. Untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maka terdapat syarat objektif dan subjektif yang harus dipenuhi. Syarat-syarat objektif untuk bisa menjadi saksi:

- 1) Dewasa, telah berumur 15 tahun atau pernah kawin;
- 2) Sehat akalnya
- 3) Tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah atau karena perkawinan dengan terdakwa. Sedangkan syarat-syarat subjektif saksi adalah: Mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa pidana, ialah melihat, mendengar atau merasakan sendiri.

Dalam memberikan kesaksian, keterangan saksi harus memenuhi 2 syarat, yaitu :

- 1) Syarat formil, dan
 - 2) Syarat materiil
- Mengenai syarat formil dapat dijelaskan, bahwa keterangan saksi seorang saksi dianggap sah, jika diberikan di bawah sumpah menurut cara agamanya (Pasal 160 ayat 3). Sedangkan keterangan saksi yang tidak disumpah menurut Pasal 185 ayat (7) KUHP, “maka keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.
 - Bagi saksi yang belum cukup 15 tahun atau karena ada hubungan keluarga dapat didengar tanpa disumpah dan keterangan dapat dijadikan tambahan bahan pertimbangan bagi Hakim. Bagi saksi yang meninggal sebelum didengar sebagai saksi tetapi di depan penyidik telah bersumpah, maka keterangannya mempunyai nilai yang sama dengan keterangan di depan sidang.

- Selanjutnya sebagai syarat formil, dinyatakan pula bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat 2).
- Adapun mengenai syarat materiil dapat dikemukakan bahwa dinyatakan Pasal 1 butir 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan: mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Oleh karena itu keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah. Dengan demikian suatu kesaksian yang didengar dari orang lain (*testomonium de auditu*) tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah. Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan :
 - 1) Kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
 - 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Keterangan ahli;

Pengertian umum dari keterangan ahli dicantumkan dalam Pasal 1 butir 28, yang menyebutkan: “keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan: “keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu

apa yang seorang ahli menyatakan dalam sidang pengadilan”. Dengan demikian jelas bahwa keterangan dari seorang ahli harus dinyatakan dalam sidang.

Seorang yang ahli dalam bidang tertentu wajib memberikan keterangannya jika diminta pendapatnya, demi keadilan (Pasal 179). Apabila seorang saksi ahli membuat keterangan dengan tulisan, maka bukan merupakan keterangan ahli (bukan di sidang pengadilan), tetapi merupakan bukti surat. Sebelum memberikan keterangan seorang ahli bersumpah. Perlu dikemukakan di sini bahwa menurut hukum acara pidana yang lama (HIR) keterangan ahli ini hanya berlaku sebagai penerangan (*inlichtingen*) saja untuk menguatkan keyakinan Hakim yang masih bimbang. Jadi dalam hal ini Hakim mempunyai kebebasan memilih bahwa keterangan tersebut akan dipergunakan atau tidak. Namun kini secara tegas dinyatakan bahwa keterangan ahli ini sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang (Pasal 184).

c. Surat

Dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan: Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c. dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat: pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian Dengan surat baik akta autentik maupun kata di bawah tangan, dimaksudkan sebagai bukti tentang sesuatu hal yang termuat di dalamnya.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa. Dengan demikian petunjuk adalah suatu kesimpulan dari Hakim tentang suatu hal, atas dasar beberapa hal yang satu sama lain saling bersesuaian.

e. Keterangan terdakwa.

Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Artinya ialah bahwa Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan atas pada dalil-dalil tersebut (R. Subekti, 2005 : 51).¹²

¹² Subekti, R. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya paramita.

Pengakuan terdakwa ialah pernyataan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah. Dalam Pasal 189 dinyatakan : “Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri”.¹³

Jadi keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Dalam hubungannya dengan ini, Pasal 175 KUHAP menyatakan bahwa, “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, hakim ketua sidang memperingatkan supaya terdakwa menjawabnya. Dalam hal ini hakim ketua sidang tidak dapat memaksa terdakwa yang tetap tidak mau menjawab pertanyaan tidak ada sanksi pidananya” (Suryono Sutarto, 1985 : 28).

D. SANKSI / HUKUMAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM POSITIF

1. Sanksi Untuk Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Didalam hukum positif tindak pidana pembunuhan seseorang diatur dalam Bab XIX Buku ke II Pasal 338-350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dari pasal tersebut, terdapat tiga ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu : (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara seumur hidup, dan (3) hukum sementara maksimal dua puluh tahun.

¹³ R.Subekti dan Tjitrosocdibio. *Kamus Hukum*. Pradya Paramita : Jakarta. 2005. hal 51

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah : perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

2. Jenis-jenis sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya : seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut¹⁴

¹⁴ R. Sugandi, SH, *op. cit*, hlm. 357

b. Pembunuhan Dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”¹⁵ Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah : “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.¹⁶

c. Pembunuhan berencana (moord)

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambinya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu menghilangkan jiwa

¹⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986, hlm. 122.

¹⁶ R. Sugandi, SH, *op. cit*, hlm.358

anaknya itu dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹⁷

e. Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 344 ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaanya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

f. Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.¹⁸

Yang dilarang dalam Pasal tersebut, adalah dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dihukum karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 359.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 359.

E. DASAR HUKUM DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM HUKUM POSITIF

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini, adalah warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang kemudian di berlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918.

Sebelum tanggal 1 Januari 1918, Indonesia pada waktu itu memberlakukan dua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873 untuk golongan Indonesia.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1967 untuk golongan Eropa.

Jadi, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) 1874 adalah turunan dari KUHP untuk golongan Eropa (1967). Juga merupakan copy dari Code Penal, yaitu hukum pidana di Perancis di zaman Napoleon pada tahun 1811. Kedua KUHP itu lah yang merupakan landasan atau sumber bagi hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Namun setelah dikodifikasi dan diunifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia, system dualism (KUHP 1867 dan KUHP 1873) tersebut dihapuskan dan hanya diadakan satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang adalah bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak 1

januari 1918. Akan tetapi isi dan kandungan serta pasal-pasal dari KUHP tersebut telah banyak di ubah, diganti dan dihapus yang oleh para pakar hukum pidana dengan memandang bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan bangsa Indonesia dewasa ini secara nasional

Pada umumnya para pakar (termasuk di Indonesia) membedakan sumber hukum ke dalam kriteria Sumber hukum materiil; dan Sumber hukum formal. Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional dan keadaan geografis.

Sedangkan Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Perspektif hukum pidana, khususnya di Indonesia menyebutkan Pancasila sebagai sumber hukum materiilnya. Pancasila merupakan factor/ landasan utama pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, dimana setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat berlandaskan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan factor utama yang melandasi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum formil dalam hukum pidana di Indonesia ada dua, yaitu sumber hukum tertulis dan terkodifikasi serta sumber hukum tertulis tidak terkodifikasi.

1. Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 3315 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya.

b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "Het Herziene Inlandsch Reglement" atau H.I.R. (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya

2. Sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi

- ✓ Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- ✓ Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- ✓ Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- ✓ Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang mengandung ketentuan pidana di dalamnya

BAB III

PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian jarimah atau jinayah

Hukum islam merupakan kaidah dan peraturan yang bersifat universal tegas melarang untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu dan merugikan individu maupun kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara sebab perbuatan kejahatan dan pelanggaran tersebut, dapat menimbulkan dampak dan konsekuensi dan yang bersifat negative dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sebagaimana diharapkan oleh agama, bangsa dan Negara. Istilah delik atau peristiwa pidana dalam hukum Islam biasa disebut jarimah, namun para Fuqaha sering menggunakan dengan kata *Jinayah atau Jarimah*. Jinayah dilakukannya fuqaha (pakar), Ahmad Hanafi (1990 : 1) mengartikan sebagai berikut :

Perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa manusia, anggota badan atau harta benda orang lain, seperti membunuh, menganiaya, menggugurkan kandungan dan sebagainya.¹⁹

Baksri (1985 : 12) menjelaskan :

Jinayah menurut istilah agama adalah pelanggaran yang dibuat manusia selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan hak makhluk yang lain, yang

¹⁹ Hanafi Ahmad, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

berkehendak kepada pembalasan atau hukuman yang setimpal diatas dunia dan di akherat mendapat hukuman Allah yang amat berat.

Dalam formulasi lain Sudarsono (1992 : 527) menjabarkan *jinayah* sebagai berikut :

“perbuatan dosa besar atau kejahatan (pidana/kriminal), seperti membunuh, menganiaya seseorang atau membuat cacat anggota badan orang lain”.

Sedangkan menurut Ma'mun Rauf (1995 : 32) menjelaskan bahwa :

Dalam islam kata “*Jarimah*” yang berarti ; larangan-larangan agama.syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang dalam hukum positif dengan istilah “Tindak Pidana”.

Selanjutnya Ma'run Rauf, menyatakan bahwa :

Para ahli hukum Islam biasa mempergunakan kata “*jinayah*” yang semula diartikan hasil perbuatan seseorang yang biasanya ditujukan terhadap perbuatan yang terlarang saja, yakni perbuatan yang dilarang oleh agama.syara' yang merugikan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukain, juga termasuk harta benda dan sebagainya.²⁰

Dari pengertian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perkataan *jinayah/jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum islam

²⁰ Ma'mun Rauf, 1995, *Pendidikan Agama Islam Disiplin Ilmu*, Lembaga Study Islam (LSI), Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang

(syara') yang mana larangan tersebut mengandung pidana yang sesuai atau setimpal dengan perbuatannya. oleh sebab itu, dapat diinterpretasikan bahwa pembunuh wajib dibunuh atau "*qishash*".

Kemudian Ahmad Hanafi (1990 : 1) mendefinisikan *jarimah* adalah : "larangan-larangan *syara*' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir". Hukuman had atau ta'zir menurut Ahmad Hanafi (1990 : 7-9) adalah sebagai berikut :

"Had' adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan atau hukuman yang sudah ditentukan batasan-batasannya dari syara'. Seperti zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri dan sebagainya. "*Ta'zir*" ialah member pengajaran (at-Ta'dib). Namun pidana islam mengartikan lain yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa dan tidak mempunyai batas-batas tertentu. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa pengertian kata "*Jinayah*", sama dengan pengertian kata "*jarimah*", apabila dikesampingkan perbedaan pemakaian katanya dikalangan *Fuqaha*.

2. Pembunuhan berencana menurut hukum islam

Pembunuhan berencana disebut juga '*Al-Qatlul- 'amdu*, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana membunuh seseorang, yang dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh seperti golok, senjata tajam, senapan, alat pemukul yang kuat, menenggelamkan ke dalam air, menahan dalam kurungan dan sebagainya.

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut **القتل** berasal dari kata **قتل** yang sinonimnya **أَمَات** artinya mematikan. sedangkan secara terminology Wahba Zuhaili dalam kitab hukum pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam Islam, pembunuhan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh syara'. Bahkan dalam Islam membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan menyelamatkan hidup seorang seolah-olah menyelamatkan hidup semua umat manusia. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al Maidah ayat 32 Sebagai berikut:²¹

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
الْإِنْسَانَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “ bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al Maidah: 32)

²¹ Tentang tafsir suarat al-maidah ayat 32 jika didalam suatu daulah berlaku hukum Islam (syareat Islamiyah) yang mana hukuman qishos berdiri didalamnya bagi mereka yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah secara sengaja.

Dan jika hukuman Qishos itu betul-betul dipraktekkan maka setiap orang yang berkeinginan atau memiliki nafsu untuk membunuh akan berhadapan dengan hukuman tersebut dan bisa jadi ia mengurungkan niatnya.

jika ia telah mengurungkan niatnya berarti ia telah menjaga kehidupan manusia seluruhnya.

Oleh karena itu Allah mnyebutkan didalam Al-Qur'an bahwa didalam hukum Qisos itu ada kehidupan.

Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum Muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keharaman pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Allah swt berfirman;

وَالَّذِينَ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحَرِّ أَوْ الْحَرُّ بِالْعَبْدِ الْفَتَىٰ فِي الْفَصَاحَةِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِي
 مِّن تَخْفِيفٍ ذَٰلِكَ بِإِحْسَنِ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِّن لَّهُ عَفَىٰ فَمَنْ بِالْأُتَىٰ
 أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَٰلِكَ بَعْدَ أَعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةٌ رَّبِّكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.
 [TQS Al Baqarah (2):178]

B. Unsur-unsur pembunuhan berencana dalam hukum islam

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pengertian *jarimah* dan *jinayah* adalah larangan-larangan *syara'*. Larangan-larangan tersebut, biasanya berupa perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk meninggalkan atau menjauhi yang di *tengah*. Akan tetapi perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang dapat memahami perbedaan (*taklif*) dan orang yang berakal sehat. *Taklif* atau mereka pembahasan dapat dilakukan sebagai panggilan atau “kitab” dan kepada mereka yang tidak dapat memahami atau mengetahui akan “*taklif*” tersebut, seperti orang gila dan anak-anak yang belum dewasa (*tamyiz*), dapat dikategorikan sebagai hewan dan benda-benda mati yang tidak akan mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ma'mun Rauf (1995 : 34) sebagai berikut :

1. *Nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut “unsur formil (*rukun sya'i*)”
2. Adanya tingkah laku yang menarik membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materiel” (*rukun maddi*)
3. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut diatas, harus terdapat pada sesuatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai *jarimah* atau delik/tindak pidana (pada hukum positif). Selain unsur umum tersebut diatas, juga terdapat unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.

Ahmad Hanafi (1990 : 6) membedakan “unsur umum” dan “unsur khusus”, sebagai berikut : “Unsur umum” adalah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua *jarimah*, sedangkan, “unsur khusus” dapat berbeda-beda jumlah dan namanya menurut perbedaan *jarimah*. Sedangkan pada hukum Islam, biasanya kedua unsur tersebut disatukan yaitu ketika atau pada saat membicarakan *jarimah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jarimah atau jinayah adalah sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan yang melanggar perbuatan jarimah diancam dengan pidana terhadap pelaku atau yang melanggar ketentuan (*nas*) tersebut.
2. Harus ada perbuatan yang dapat digolongkan sebagai jarimah
3. Orang yang melakukan perbuatan jarimah (pembuat) tersebut, adalah orang yang dimintai pertanggung jawabannya.

C. Alat Bukti Dalam Hukum Islam

Di dalam upaya penegakkan hukum, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting. Sebab kepada akurasi atau kecermatan upaya pembuktian itulah keadilan yang ingin diwujudkan melalui penegakkan hukum sangat bergantung. Pembuktian yang akurat adalah jalan menuju tegaknya keadilan. Sebaliknya, dari pembuktian yang tidak akurat akan lahir ketidakadilan. Untuk melaksanakan perintah mewujudkan keadilan tersebut diperlukan pembuktian yang akurat, maka para hakim harus melakukan pembuktian yang akurat itu dengan menghimpun sebanyak mungkin alat bukti agar vonis bersalah atau tidak bersalah yang dijatuhkan kepada pihak yang sedang diadili benar-benar memenuhi kualifikasi adil.²²

Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan hak bagi hakim. Dan bagi hakim, alat bukti tersebut dipergunakan sebagai dasar memutus perkara.

Suatu perkara di pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan

²² Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.53

bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolaknya gugatan karena tidak ada bukti.

Di dalam kitab-kitab fiqh kebanyakan fuqaha menyebut dengan alat bukti dengan Al Bayyinah, Al Hujjah , Ad Dalil, Al Burhan.

Sebagaimana disebutkan di atas pengertian bayyinah merupakan suatu bukti-bukti yang menjelaskan dalam keperluan pembuktian agar menyakinkan hakim. Yang dimaksudkan dengan yakin adalah sesuatu yang ada berdasarkan kepada penyelidikan yang mendalam dan sesuatu yang telah diyakini tidak akan lenyap kecuali datangnya keyakinan yang lain lebih kuat dari pada keyakinan yang ada sebelumnya.²³

Pada dasarnya alat-alat bukti yang dipergunakan dalam perkara pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan (رأى) menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut syara', pengakuan didefinisikan sebagai berikut:

شرعا هو الاذ بار عن حق او الاء تراف به الاق رار

Pengakuan menurut syara' adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.

Dasar hukum tentang iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun sumber dari Al-Qur'an tercantum dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi:

²³ Ibid. Hal.43

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِكُمْ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِمَا طَّهَّرَ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلَوْذًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...”

Sumber hukum dari sunnah terdapat di dalam hadits Ma'iz yang datang kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadits tentang kisah Al-'Asif. Dalam hadits Al-'Asif, Nabi bersabda:

واغديا ان يس لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها

Artinya:

“...Dan pergilah kamu hai Unais yang memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah ia.”(Muttafaq alaih)

Di samping Al-Qur'an dan sunnah, para ulama bahkan semua umat Islam telah sepakat tentang keabsahan pengakuan, karena pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. Alasan lain adalah bahwa seorang yang berakal sehat tidak akan melakukan kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu, pengakuan lebih kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua jenis tindak pidana.

Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan misalnya, seperti caranya, alatnya,

motifnya, tempat, dan waktunya harus diungkapkan secara jelas oleh orang yang mengaku melakukan perbuatan tersebut.

Di samping itu, syarat yang lain untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa (terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari orang gila atau hilang akalnya dan yang dipaksa, hukumnya tidak sah dan tidak dapat diterima.

2. Persaksian

Pengertian persaksian (قُدَاهِشِلَا), sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

السَّهَادَةُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَهِيَ إِذْ بَارِ صَادِقٍ لِأَثْبَاتِ حَقِّ بِ لَفْظِ

Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.

Dasar hukum untuk persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* (Al-Baqarah ayat 282)

Inilah ayat terpanjang dalam al-Qur'an, dan dikenal oleh para ulama' dengan nama Ayat al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran – atau menurut sebagian ulama' – kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil

menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.²⁴

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt. Kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Sumber dari sunnah antara lain tercantum dari hadits Amr ibn Syu'aib:

“ Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaishah yang paling kecil ditemukan terbunuh di pintu Khaibar maka Rasulullah saw., bersabda: “ Ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqishasnya..(HR. Nasa’i)

Untuk jarimah yang hukumannya qishas, menurut jumhur fuqaha, pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan seorang saksi laki-laki dan dua perempuan, atau seorang saksi laki-laki ditambah sumpahnya korban.

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Baligh (dewasa)

Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksiannya tidak dapat diterima.

2. Berakal

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak

²⁴ Prof. Dr. Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina. Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003, hal.139

mungkin, serta mudarat dan manfaat. Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang sempurna akalanya tidak dapat diterima.

3. Kuat ingatan
 seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannya.
4. Dapat berbicara
 Apabila ia bisu, status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Maliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dapat dipahami. Menurut mazhab Hanbali, orang yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami kecuali apabila ia dapat menulis. Sebagian ulama syafi'iyah dapat menerima persaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talak. Akan tetapi sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat.
5. Dapat melihat
 Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya.

6. Adil

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal daripada hawa nafsu.

7. Islam

Dengan demikian, persaksian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara non muslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima semua fuqaha. Akan tetapi, terhadap prinsip yang sudah disepakati ini terdapat dua pengecualian sebagai berikut.

a. Persaksian orang bukan Islam terhadap perkara orang bukan Islam
Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa persaksian orang kafir dzimmi atas perkara sesamanya dan orang kafir harbi atas perkara sesamanya dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang memperkenalkan persaksian orang Nasrani atas perkara sesama mereka. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi'iyah menolak sama sekali persaksian orang yang bukan Islam secara mutlak, baik perkara orang Islam maupun perkara bukan Islam.

b. Persaksian nonmuslim atas perkara muslim dalam hal wasiat di perjalanan
Golongan Hanabilah berpendapat bahwa apabila golongan seorang muslim yang sedang berpergian meninggal dan berwasiat dengan disaksikan oleh orang-orang bukan muslim maka persaksian mereka dapat diterima, apabila tidak ada orang lain yang beragama Islam.

Pendapat Zhahiriyah dalam hal ini sama dengan pendapat Hanabilah. Akan tetapi Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, serta Zaidiyah tidak menerima persaksian orang non muslim dalam kasus ini, karena orang fasik saja tidak diterima, apalagi orang kafir.

3. Qarinah

Pengertian qarinah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:

القرينة هي كل أمارات قارن شدينا في إياها تدل عليه

Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.

Qarinah itu terbagi menjadi dua, yakni :

1. **Qarinah Qanuniyyah** yakni **qarinah** yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun pengertian daripada persangkaan undang-undang yakni persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.

Menurut M. Nur Rasaid, tentang menarik persangkaan menurut undang-undang ini haruslah dianggap sebagai perbandingan saja, yang oleh Hakim harus dipertimbangkan apakah dalam suatu kasus tertentu berlaku ketentuan tersebut.

2. **Qarinah Qadaiyyah** yakni **qarinah** yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah dilakukan pemeriksaan perkara. Pengertian persangkaan hakim adalah: persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan. Persangkaan ini adalah persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim sepenuhnya.²⁵

4. Data Forensik

Dalam ilmu kedokteran dikenal adanya Kedokteran Forensik yaitu cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta-fakta medis pada masalah-masalah hukum; atau ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.

²⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm.88.

Melalui ilmu kedokteran forensik dapat diketahui telah terjadi kejahatan atau tidak, misalnya jarimah perzinaan. Penemuan itu dapat berupa diketahuinya: selaput dara yang robek, atau tanda memar pada alat kelamin, diketahuinya golongan darah si pelaku, diketahuinya jenis kromosom atau genetik, diperolehnya bukti kehamilan sampai diketahuinya dan didapatkannya bukti DNA yaitu inti sel yang terdapat pada sel darah putih yang spesifik pada setiap orang.

Jadi pembuktian melalui ilmu kedokteran forensik dapat dikatakan sama kuatnya dengan bukti melalui penglihatan mata telanjang secara tradisional. Dalam laporan *visum et repertum* (keterangan atau keterangan ahli) dokter yang melakukan pemeriksaan forensik melaporkan hasil penglihatannya atas barang bukti yang diperiksa secara lengkap dengan ciri-ciri hasil pemeriksaannya.

Oleh karena itu, kualitas hasil penelitian ilmu pengetahuan Kedokteran Forensik dapat dipertimbangkan menjadi alat bantu pembuktian perkara pidana Islam.

D. Sanksi / Hukuman Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam

Seperti diketahui bahwa perkataan pidana dapat diartikan sebagai “hukuman”, akan tetapi istilah hukuman merupakan istilah yang bersifat integral dan konvensional, sebab dapat berkonotasi dalam hal yang cukup luas. Dimana istilah tersebut dapat digunakan dalam istilah sehari-hari, baik dalam bidang agama, pendidikan, moral dan sebagainya.

Sudarta (Muladi dan Arif 1992 : 2) menjelaskan “pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan syarat-syarat tertentu”. Sehubungan dengan hal tersebut, Roeslan Saleh (Muladi dan Arif, 1992 : 2) mengemukakan sebagai berikut : “pidana adalah reaksi ditimpakan Negara pada pembuat delik itu”.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kata “pidana” itu, pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan oleh orang dan subyek hukum lainnya.

Jadi yang dimaksud dengan “pidana mati” adalah suatu hukuman atau penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabiskan nyawanya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pidana mati merupakan klasifikasi hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pidana mati tersebut, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana diklasifikasikan sebagai pidana pokok, sedangkan dalam hukum pidana Islam (hukum Islam) dikenal dengan nama “*qiahash*”, yaitu hukuman setimpal yang dijatuhkan kepada pembuat jarimah atas perbuatannya. Akan tetapi hukuman qihash ini hanya dapat dijatuhkan pada pembunuhan sengaja atau direncanakan lebih dahulu dan penganiayaan sengaja.

Dalam doktrin Islam, jarimah (tindak pidana kejahatan) pembunuhan diancam pidana mati (*qishash*), tidaklah semua jenis pembunuhan. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana islam (hukum islam), hanya dikenal tiga macam jenis pembunuhan.

Noorwahidah Hafez Anshari (1982 : 32-37) mengemukakan tiga jenis pembunuhan, sebagai berikut :

1. Pembunuhan disengaja atau direncanakan terlebih dahulu (*ai-Qutlul- ‘amdu*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-Qatlul –syibhul- ‘amdu*)
3. Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesilapan (*al-Qatlul-khata’*)

a) Pembunuhan disengaja atau direncanakan (*al-Qatlul-‘amdu*)

Pembunuhan disengaja adalah pembunuhan yang dengan sengaja (termasuk dalam niatnya) dan direncanakan lebih dahulu membunuh orang lain.

Noorwahidah Hafez Anshari (1982 : 32) menjelaskan pembunuhan disengaja sebagai berikut :

Pembunuhan dengan sengaja disebut juga ‘*Al-Qatlul- ‘amdu*’, yaitu pembunuh dengan sengaja dan berencana membunuh seseorang, yang dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh seperti golok, senjata tajam, senapan, alat pemukul yang kuat, menenggelamkan ke dalam air, menahan dalam kurungan tanpa member racun dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bakri (1985 : 17) mengemukakan sebagai berikut :

Pembunuhan dengan sengaja biasa disebut juga dengan ‘amad’, yaitu pembunuhan dengan rencana lebih dahulu , mempunyai alat pembunuh yang biasa dipergunakan untuk membunuh, pembunuh semacam ini dihukum bunuh atau kisas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kejahatan pembunuhan yang di lakukan secara atau dengan sengaja itulah yang mendapat hukuman mati (*qiyash*). Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 (Departemen Agama RI. Al Qu’an dan terjemahannya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ

مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ
يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qiahash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang dapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar denda (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu ketinganan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. Dan dalam qihash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Namun menurut Sayyid Sabiq (1994 : 31-32) bahwa, kejahatan pembunuhan dengan sengaja baru dapat dibuktikan apabila menurut syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pembunuh adalah orang yang berakal, baliqh, sengaja membunuh
- b. Siterbunuh hendaknya manusia dan darahnya dilindungi oleh hukum
- c. Alat yang dipergunakan untuk membunuh adalah yang qalibnya dapat mematikan.

Apabila syarat-syarat tersebut teroenuhi, maka pembunuhan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dengan sengaja dan pelakunya wajib di jatuhi hukuman mati (*qashash*).

b) Pembunuhan semi sengaja (*al-Qatlul-Syibhul-‘amdu*)

Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi oleh hukum dan pembuatnya adalah orang *mukallaf*, sengaja dalam melakukannya dan memakai sarana atau alat yang pada dasarnya tidak mematikan, seperti memukul seorang dengan lidi atau kayu kecil dan tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia (mati).

Dalam kasus ini, pembuat (pembunuh) tidak dikenakan *qiyash* dan hanya diwajibkan membayar diyat (denda berat) yang dibebankan pada keluarganya, dan dapat diangsur selama tiga tahun.

Adib Bisri Mustafa (9194 – 361) mengatakan bahwa hal tersebut di atas, dapat kita pahami dari hadits Iman Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Daud dari Amr Ibnu Syu’aib dari ayahnya dari kekeknnya bahwa Nabi Muhammad Saw. Pernah bersabda :

Artinya : Telah diceritakan dari Amir bin Syu’aib dan ayahnya dari kakeknnya; “Bahwasanya Nabi Saw, bersabda diyatnya pembunuh mirip kesengajaan (*syibhul ‘amdu*), diperberat seperti diyatnya pembunuhan berencana (*disengaja*) sedangkan pelakunya tidaklah dihukum bunuh.”

c) Pembunuhan karena kesilapan (*al-Qatlul khata’*)

Pembunuhan karena kesilapan ini, biasa juga disebut dengan pembunuhan tidak sengaja (tidak dimaksud dalam niatnya), yaitu perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh pembuat dengan tidak menghendaki matinya orang tersebut, melainkan hanya karena kelirunya atau dengan tidak disengajanya perbuatan

tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, seperti seorang pemburu, akan tetapi tanpa disengaja tembakannya mengenai orang lain yang sedang lewat dan orang tersebut mati, maka baginya (pembuat) tidak dikenakan pidana kisas, dan hanya dikenakan denda ringan dan dibebankan kepada keluarganya. Dan apabila keluarga terbunuh (keluarga sikorban) menyedekahkannya, maka pelaku tidak lagi diharuskan membayar denda. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً
فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya :

Dan barang siapa membunuh seorang mungkin karena tersalah (tidak sengaja), maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman disertai membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga siterbunuh itu, kecuali jika mereka (keluarga korban) menyedekahkannya.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pembunuhan yang diancam dengan pidana mati atau kisas, adalah hanya jenis pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, sedangkan pembunuhan jenis lainnya, hanya dikenakan suatu kewajiban membayar denda (diyat) yang dibebankan kepada keluarga pembunuh (pembuat).

E. Dasar Hukum Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan, merupakan suatu perbuatan kejahatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT, dan jenis pembunuhan tersebut, diancam dengan pidana mati (qishash).

Keberadaan hukum kisas didalam hukum pidana Islam didasarkan pada nash (ketentuan) Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, yang antara lain :

Allah SWT, Berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi

لَعَلَّآ نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya :

Barang siapa yang berbuat salah, maka pembalasan atas kesalahan itu dengan hukuman yang setimpal.

Kemudian Rasulullah SAW, dalam satu Haditsnya (Abdi Bisri Mustafa : 1993 :

255) bersabda :

Artinya :

Bersumber dari Anas; sesungguhnya seorang lelaki yahudi membunuh seorang jariah dari kaum anshar untuk merampas perhiasan yang dikenakannya. Kemudian melemparkan mayat wanita malang itu kedalam sebuah sumur, sementara ia pecahkan kepala wanita malang itu dengan batu. Tetapi lelaki yahudi itu akhirnya bias ditangkap dan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu menyuruh untuk menghukum pancung sampai mati. Perintah Beliau itu, akhirnya dilaksanakan hingga lelaki yahudi itu mati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Allah SWT berfirman dalam surah Al-

Isra' ayat 33, sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّهُ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara lazim, maka sesungguhnya kami telah member

kekuasaan kepada ahli warinya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Surah Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُۥ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya :

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibals) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.²⁶

Lalu dalam Al-Qur'an Allah Berfirman dalam surah An-Nisa ayat 92 dan 93 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٌّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ دِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

²⁶Intisari dari surah al-maidah 45 sejarah mengatakan bahwa Muhammad sangat senang dengan perintah Taurat tentang hukuman mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Muhammad sangat terpesona oleh hukum ini sehingga dia ingin sekali menerapkannya (lihat ayat 38). Tetapi orang Yahudi memprotesnya, sehingga Muhammad marah dan mengatakan orang Yahudi telah menukar ayat-ayat Tuhan.

حَكِيمًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya :

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena bersalah (tidak sengaja), barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (sipembunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (siterbunuh) dari kaum memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah sipembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (siterbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah sipembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (siterbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Maka barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Rasulullah SAW, dalam salah satu haditsnya (Bey Arifin dan syngthy

Djamaluddin : 1993 : 858) bersabda :

Artinya :

Dari Amir bin Syuaib, dari ayahnya, dari Nabi Saw, Beliau bersabda; orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka diserahkan kepada pembunuhan boleh mereka membunuhnya. Jika mereka mau mema'afkan (memungut diyat saja) boleh mereka memungut diyat saja.

Berdasarkan interpretasi yang terkandung dalam firman Allah swt, dan sabda Nabi Muhammad Saw (rasul-Nya) tersebut diatas, dapat di indikasikan bahwa Allah SWT mensyari'atkan hokum qishash bagi orang yang membunuh sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Baqarah "Diwajibkan atas kamu kisas dalam pembunuhan sengaja dan direncanakan", sebab dengan adanya hukum kisas tersebut, kehidupan masyarakat dapat terlindungi dan dapat melangsungkan kehidupannya dengan aman dan tenteram.

Oleh sebab itu, hukum islam menegaskan bahwa setiap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, wajib di qisas atau dihukum bunuh (mati) pula, yang diputuskan perkaranya oleh hakim.

Kemudian jenis pembunuhan yang diwajibkan membayar diyat dan kaffarat, yaitu memerdekakan hamba yang beriman, mengingat keadaan sekarang tidak ada lagi dikenal istilah hamba, ia diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut.

Berdasarkan dari beberapa ayat dan hadits yang telah dijelaskan tersebut diatas hemat penulis bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, meskipun dilakukan dengan pukulan apalagi menggunakan alat yang pada hukuman setimpal dari perbuatannya (*qishash*).

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Islam Dan Pidana Positif

1. Karakteristik Penjatuhan Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Berencana

a. Menurut Penjatuhan Pidana Positif

Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dengan membentuk dan memformulasikan beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk dari semua hukum pidana, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang “Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pelaksanaan Pidana Mati, dan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang “Mahkamah Agung”.

Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal 1 :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 :

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 diatas, diserahkan kepada Badan-Badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan tugas pokok sebagaimana yang di sebutkan di atas, maka dalam pasal 14 ayat (1) menegaskan sebagai berikut :

Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dngan dalih bahwa hokum tidak kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahkan lebih jauh Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menegaskan :

Hakim sebagai penegak hokum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas, justru mengharuskan Hakim Peradilan menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam memberikan atau menetapkan keputusannya, pendekatan yang harus digunakan atau dilakukan oleh para hakim bukan saja bersifat yuridis formal, akan tetapi perlu dipertimbangkan pula segi “*sosio kulturalnya*” dan bahkan “*sosio politik*” . Selain itu hakim wajib pula memperhatikan sifat-sifat yang baik dan buruk (jahat) dari tersangka atau pelaku dalam hal menjatuhkan vonis yang diramu oleh hakim itu sendiri, baik kepada masyarakat, bangsa dan Negara terlebih-lebih tanggung jawabnya kelak di kemudian hari di depan Allah SWT .

Namun dalam upaya melaksanakannya dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tersebut di atas, maka dalam pemeriksaan perkara di persidangan akan dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim, yakni seorang bertindak sebagai Hakim Ketua dan yang lainnya bertindak sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh seorang Panitera. Akan tetapi, dalam perkara pidana wajib pula terdakwa di damping oleh seorang penasehat hukum, baik sejak dilakukan penangkapan atau penahanan maupun pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan. Penasehat hukum tersebut tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, hukum dan asas keadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, dalam Pasal 50, ditegaskan bahwa : Pengadilan Negeri tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

Jadi segala bentuk keputusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga dan oleh pihak manapun juga, kecuali melalui upaya hukum lain, seperti upaya hukum banding dan kasasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan pidana mati atau hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana (pembuat), dilakukan setelah mendapat eksekusi dan kekuatan hukum yang tetap dan pastidari Majelis Hakim yang bertanggung jawab atas semua keputusannya. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 11 KUHP, maka pidana mati dijalankan sebagai berikut : Hukuman mati dilakukan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat itu pada tiang penggantung kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jiwa serta keadaan revolusi Indonesia maka dengan Penpres atau Undang-undang nomor 2/PNPS/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, (Noorwahidah, 1982 : 72-73) :

Waktu dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut, setelah mendengar nasehat dari jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pidana mati.

- a. Kepala Polisi Komisariat atau perwira yang ditunjuk olehnya bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab, juga pembela/pengacara terhukum atas permintaannya sendiri atau permintaan terhukum, menghadiri pelaksanaan pidana mati itu.
- b. Terhukum diberitahukan tentang akan dilaksanakan pidana mati oleh jaksa tinggi/jaksa tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya saat pelaksanaan, dan pada terhukum diberikan kesempatan untuk mengemukakan sesuatu keterangan atau pesanan pada hari-hari terakhirnya. Dan apabila seorang terhukum seorang wanita sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dilakukan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.
- c. Untuk pelaksanaan pidana mati itu Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut membentuk sebuah regu menembak, terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira yang kesemuanya itu dari Brigade Mobile dan berada dibawah perintah seorang Jaksa Tinggi/Jaksa sampai tugas tersebut selesai.
- d. Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Kemudian pasal 14 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2/PNP/S/1964 menjelaskan sebagai berikut :

Untuk memperoleh keterangan yang pasti tentang matinya terpidana, maka Jaksa Tinggi /Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati tersebut, dapat meminta bantuan dari seorang dokter.

Namun pembunuhan yang diancam dan dijatuhi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu atau dalam bahasa belanda biasa disebut dengan “moord”, istilah tersebut terdapat dalam pasal 340 KUHP sebagai berikut :

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana moord, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Bunyi pasal tersebut diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Dengan rencana lebih dahulu
- d. Merampas.menghilangkan nyawa orang lain,
- e. Perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum.

Berpijak dari unsur-unsur tersebut diatas, hal itulah yang merupakan karakteristik/penerapan dan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam

memutuskan dan menjatuhkan pidana atau hukuman, khususnya pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Di samping data/fakta yang diperoleh selama dalam persidangan, baik data atau keterangan-keterangan dari saksi-saksi.

Keterangan dari terdakwa maupun alat bukti lain yang digunakan untuk membunuh menurut pasal 340 KUHP.

b. Menurut Penjatuhan Pidana Islam

Pembunuhan yang diancam pidana mati dalam hukum pidana Islam adalah, pembunuhan yang dilakukan dengan niat sengaja atau direncanakan menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain, yang darahnya dilindungi oleh hukum dan Undang-undang (darah orang mukmin), sedang orang Islam membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan pemerintah islam (kafir dzimmi), maka pembunuh tetap dikenakan hukum qishash.

Pelaksanaan pidana mati (qishash) dalam hukum pidana Islam sifatnya relative, sebab tergantung pada tuntutan dan keputusan dari wali (keluarga) si korban dengan dapat memberikan alternative lain sebagai pengganti hukuman qishash, misalnya pembuat dapat dibebaskan dari hukuman qishash, apabila keluarga si korban menghendakinya (mema'afkannya) dan diganti dengan suatu pembebanan (taklif) atau di bebaskan membayar diyat (denda) berat kepada keluarga (wali) si korban. Dengan demikian dapatlah disimpulkan

bahwa, Karakteristik/penerapan penjatuhan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (khususnya pidana mati) menurut pasal 340 KUHP dengan hukum Islam, adalah dengan terbukti adanya kriteria “dengan sengaja” dan “direncanakan lebih dahulu”, sebelum melakukan niatnya untuk membunuh.

B. Persamaan Dan Perbedaan Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam Tentang Pembunuhan Berencana

1. Persamaan dan Perbedaan

Sebagaimana diketahui, bahwa Islam itu bersifat internasional-universal, ditetapkan atas semua jarimah (tindak pidana) yang terjadi dibagian dunia manapun juga. Akan tetapi kenyataan praktisnya, hukum Islam (hukum pidana Islam) itu bersifat regional, yang hanya diterapkan khususnya di negara-negara Islam dan Negara-negara yang penduduknya kebanyakan atau umumnya beragama Islam, seperti Negara republik Indonesia.

Adapun persamaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Lingkungan berlakunya; hanya dapat diterapkan khusus di Negara-negara Islam dan Negara yang mayoritas beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan azas nasionalis dan territorialitas, yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana positif, sebagaimana yang tertera dalam pasal kitab Undang-undang Hukum pidana berikut ini :

Pasal 2 :

Ketentuan pidana dalam Undang –undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).

Pasal 5 KUHP :

a) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan diluar Indonesia;

1e. salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab I dan II buku kedua, dan dalam pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.

2e. suatu perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia dan boleh dihukum menurut undang-undang negeri tempat perbuatan itu dilakukan.

b) Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada ke 2e boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga Negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

Bertolak dari kedua pasal KUHP tersebut, dijelaskan tentang luasnya ketentuan Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu berlaku kepada siapa saja (kecuali mereka atau orang asing yang memberi hak exterritorialiteit oleh hukum internasional), dan dimanapun juga (khususnya wilayah Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang).
Jelaslah kiranya bahwa dalam pasal tersebut menganut prinsip

“Territorial”. Sedangkan dalam pasal 5 KUHP, meletakkan adanya prinsip “*nasionaliteit*” dan “*personaliteit*”.

- b. Teori Penafsiran; pada umumnya kaidah-kaidah penafsiran dalam hukum pidana Islam juga terdapat dalam hukum pidana positif, sekalipun dalam hukum pidana positif kita dapati berbagai macam penafsiran. Dalam hukum pidana positif, pada prinsipnya setiap keragu-raguan ditafsirkan dengan cara yang menguntungkan terdakwa. Penerapan hal tersebut, terkadang biasa mengakibatkan ringannya hukuman bagi pembuat atau bahkan bebas sama sekali. Misalnya jika hakim pengadilan meragukan adanya unsure “kesengajaan” atau “perencanaan” dalam kasus pembunuhan direncanakan (pasal 338 KUHP), maka keragu-raguan tersebut harus menguntungkan terdakwa, dan apabila kedua unsure tersebut diatas tidak terdapat atau terbukti, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu, akan tetapi termasuk dalam pembunuhan tidak disengaja atau mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya (pasal 359 KUHP).

Demikian pula halnya dalam hukum pidana Islam, bahwasetiap keragu-raguan di interpretasikan dengan cara yang menguntungkan terdakwa (pelaku), yaitu penghapusan hukuman had karena adanya syubhat, dan pengutamaan pemberian pengampunan. Yang di maksud dengan Syubhat adalah adanya suatu hal yang memberi kesan kepada orang atau

masyarakat bahwa sesuatu perkara ada atau terjadi, yang sebenarnya tidak demikian.

- c. Azas legalitas; baik hukum pidana positif maupun hukum pidana islam, menganut prinsip legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan ketentuan (*nash*) dalam Undang-undang yang berlaku, seperti yang termaksud dalam pasal 1 KUHP, sebagai berikut :
 - Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada sebelumnya dari pad a perbuatan itu.
 - Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.
- d. Percobaan melakukan tindak pidana (jarimah); pendirian hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah sesuai atau sama dalam hal tidak adanya hukuman pada fase-fase pemikiran dan perencanaan, persiapan dan pembatasan hukuman pada fase pelaksanaan semata-mata.
- e. Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum; pendirian hukum pidana positif, adalah sama dengan pendirian hukum Islam mengenai pengertian perbuatan langsung dan tidak langsung (turut berbuat langsung dan tidak langsung) bentuk-bentuk dan hubungan pertalian sebab-akibat antara perbuatan langsung dengan jarimah yang terjadi.

Demikian gambaran sebagian dari sekian banyak persamaan atau kesamaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang dapat penulis uraikan dalam skripsi ini. Begitu pula halnya dengan bentuk atau jenis pelanggaran dan kejahatan dalam hukum pidana positif, juga terdapat banyak kesamaan-kesamaan dengan hukum pidana Islam.

Khusus mengenai bentuk kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang terdapat dalam pasal 340 KUHP dengan hukum pidana Islam, dikatakan sebagai berikut :

Pasal 340 :

Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan pidana mati atau penjara paling lama dua puluh tahun.

Dalam Al-Qur'an dan Surah Al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.

Jadi jelaslah, bahwa hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai pembunuhan berencana terdapat kesamaan. Hal ini terbukti dengan adanya criteria atau unsur kesengajaan dan perencanaan lebih dahulu sebelum melakukan niatnya merampas atau menghilangkan jiwa orang lain, sekalipun hukum pidana Islam (Hukum Islam), tidak mengenal pemisahan jenis pembunuhan tersebut, yaitu pembunuhan dengan sengaja (pembunuhan biasa) dan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu sebagaimana dalam hukum pidana positif memisahkan kedua jenis pembunuhan tersebut yaitu pembunuhan disengaja diatur dalam pasal 340 KUHP. Akan tetapi kedua unsur tersebut (sengaja dan direncanakan) pada prinsipnya adalah sama, sebab timbul dari motif dan inisiatif/tujuan yang sama, yaitu sama-sama menghendaki matinya orang lain sebagai akibat dari perbuatannya (membunuh) dengan memikirkan secara tenang, yang sebenarnya ia (pembuat) dapat membatalkan niatnya untuk membunuh dan mengetahui pula konsekuensi dan akibat hukum dari perbuatannya.

2. Perbedaanannya

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah sama. Sekalipun demikian kedua aturan hukum tersebut ada perbedaan-perbedaannya.

Dal ini dapat dilihat, antara lain dari sumber hukum pidana Islam itu sendiri, dimana bersumberkan dari nash-nash Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi

Muhammad Saw. Sedangkan hukum pidana positif (hukum pidana positif) merupakan produksi buatan manusia biasa.

Hukum pidana Islam telah ada sebelumnya atau telah diterapkan sebelum ada atau lahirnya hukum pidana positif. Oleh sebab itu, sudah barang tentu hukum pidana islam lebih teliti, lebih elastis dan lebih menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat.

Hal tersebut diatas dapat dibuktikan dari penerapan azas legalitas dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dimana syari'at Islam telah menerapkan azas tersebut sebelum dikenal dan diterapkan oleh hukum pidana positif dua belas abad sebelumnya dan cara penerapan azas tersebut, yaitu :

- a. Untuk jarimah yang berbahaya (*jarimah qishash diyat*), asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali, dimana tiap-tiap jarimah dan hukumannya dicantumkan satu persatu.
- b. Untuk jarimah yang tidak begitu berbahaya (*jarimah ta'zir*) pada umumnya, syara' memberikan kebebasan dalam penerapan arus legalitas dari segi pidana atau hukumannya. Dimana Hakim dapat memilih sejumlah hukuman yang telah disediakan oleh syara' yang sesuai peristiwa-peristiwa yang dihadapinya.
- c. Untuk jarimah ta'zir yang diancam hukuman karena untuk kepentingan syara' memberikan kelonggaran dalam penerapan azas legalitas dari sudut penentuan macamnya jarimah, sebab syari'at hanya mencakupkan dengan

membuat suatu nash yang umum sekali dan bias mencakup setiap perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat.

- d. Adapun cara atau system penerapan azas legalitas pada hukum positif untuk semua jarimah atau peristiwa pidana adalah sama. Pada awalnya hukum positif memakai cara pada point pertama tersebut diatas untuk semua jarimah. Hal ini menyebabkan hakim tidak menjatuhkan hukuman berat terhadap jarimah yang tidak berbahaya dan dapat pula menyebabkan terdakwa bebas sama sekali. Kemudian hukum positif mengambil cara kedua (dalam syara'), dengan mempersempit kekuasaan hukum dalam memilih hukuman dan dalam menentukan besarnya. Namun cara inipun di terapkan secara umum dan salah satu akibatnya ialah semakin meningkatnya jarimah ringan atas jarimah-jarimah tersebut yang dimungkinkan oleh kekuatan mereka dalam memilih hukuman.

Dari penjelasan diatas, hemat penulis letak perbedaan-perbedaan kedua aturan tersebut (hukum pidana positif dan hukum pidana Islam), hanya terletak pada sistem penerapan dan hukumnya saja.

Pembunuhan berencana yang terdapat dalam hukum pidana positif dijelaskan bahwa pembuat yang melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menjelaskan bahwa pembuat yang melakukan pembunuhan dengan

sengaja atau direncanakan, maka baginya berlaku qishash, yaitu membunuh maka wajib dibunuh atau diyat, yaitu denda berat yang dibebankan kepada keluarganya apabila mendapat suatu pema'afan dari pihak keluarga korban (siterbunuh).

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas, nampaklah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kedua aturan hokum tersebut, dimana hukum pidana Islam mengenal adanya pema'afan dari pihak keluarga korban kepada pembuat, sehingga yang tadinya pembuat dapat dipidana mati akhirnya tidak (dihapus) dan diganti dengan hukuman diyat atau denda berat yang dibebankan kepada keluarga pembuat atau pelaku pembunuhan. Sedangkan dalam hukum pidana positif tidak mengenal adanya pema'afan seperti yang terdapat dalam hukum pidana Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah di rumuskan, adalah sebagai berikut :

1. Delik pembunuhan berencana menurut hukum pidana positif dapat dijatuhkan pidana, apabila pembuat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tidak pidana pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang oleh hakim pengadilan dapat memutus dan menjatuhkan pidana (hukuman) kepada pebuat (pelaku). Sedangkan menurut hukum pidana Islam sifatnya relative, yaitu tergantung pada tuntutan dari keluarga (wali) sikorban dengan dapat memberikan alternative lain sebagai pengganti hukuman qishash apabila pihak keluarga/wali menghendakinya.
2. Letak persamaan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai pembunuhan, dapat dilihat dengan terbukti adanya unsur kesengajaan dan perencanaan lebih dahulu sebelum melakukan niatnya merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi timbul dari motif dan inisiatif/tujuan yang sama, yaitu sama-sama menghendaki matinya orang lain yang sebenarnya dapat ia (pembuat) batalkan niatnya untuk membunuh. Adapun perbedaannya, yaitu hukum pidana Islam tidak mengenal pemisahan kedua jenis pembunuhan, seperti yang terdapat dalam hukum pidana positif memisahkan kedua jenis pembunuhan tersebut. Pembunuhan biasa/sengaja diatur dalam pasal 340 KUHP dan hukum pidana positif tidak mengenal adanya ampunan (pema'afan) dari pihak keluarga korban dari pelaku pembunuhan (pembuat), sebagai dalam hukum pidana Islam mengenal adanya

pema'afan tersebut sehingga yang tadinya pembuat dapat pidana mati (di qishash), akhirnya bebas dan diganti dengan diyat atau denda berat yang dibebankan kepada keluarga (wali) pelaku/pembuat.

B. SARAN

1. Perlu adanya partisipasi aktif dari semua pihak, khusunya ketegasan dari aparat pemerintah, baik aparat kepolisian, aparat hakim pengadilan maupun aparat hokum lainnya yang terkait didalamnya, agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang sebenarnya, baik menurut Undang-Undang Hukum Pidana positif maupun aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, sehingga tercerminlah azas keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Hendaknya pula ditingkatkan penyuluhan agama, sebab dengan dasar keimanan yang kuat dalam diri seseorang, niscaya mereka akan menyadari bahwa perbuatan pembunuhan itu adalah disamping melanggar hukum pidana positif di Indonesia, juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama (Islam), dan diberikan sanksi hukuman di dunia dan di Akhirat mendapat hukuman dari Allah SWT yang sangat berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daud Muhammad, 1993, *Hukum Islam, Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Admijaya, Tirta 1985, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Anshari, Noorwahidah afez, 1982, *Pidana Mati Menurut Islam*.
- Arifin, Bey dan A. Syingithy Djamaluddin, 1993, *Terjemahan Sunan Abu Dawud, Asysyifa*, Semarang.
- Anwar, Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung.
- Bawengan, GW, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bakri, P.M.K, 19855, *Hukum Pidana Dalam Islam*, CV. Ramadhani, Penumping, Solo.
- Departemen Agama RI, 1967, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Jakarta.
- Hanafi Ahmad, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Haliman, 1971, *Hukumm Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, Bulan Bintang, Jakarta
- Haryono Anwar, 1988, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984
- Kenter dan Sianturi, S.R, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AM-PTHM, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Lamintang, P.A.F, 1990, *Hukum Pidana Indonesia Sinar Baru*, Bandung.
- Madiloes, 1980, *Pengantar Pidana Islam*, CV. Amaliah, Jakarta
- Ma;mun Rauf, 1995, *Pendidikan Agama Islam Disiplin Ilmu*, Lembaga Study Islam (LSI), Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Moe;jatno, 1993, *Azas-azas Hukum*, Bina Aksara Jakarta.
- Mustafa, Adib Basri, 1994, *Terjemahan Shalih Muslin*, Ashy-Syifa, Semarang.
- Muladi dan B.N Arif, 1992, *Teori-teori dan Kebijaksanaan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poerwadariminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjadikoro Wirjono, 1986, *Tindak-TIndak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Sahetapy, J.E, 1982, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancamana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1983, *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Hukum Disipliner*, Sinarwijaya, Surabaya.
- Shon Haji, H. Abdullah, dkk, 1993, *Terjemahan Sunan Ibnu Maja*, Ashy-Syifa, Semarang.
- Soeharto, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Sabiq Sayyid, 1994, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Soesilo R. 1986, *KUHP dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sudarsono. 1992, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung.

B. Internet

<http://adelesmagicbox.wordpress.com/2011/09/24/hukum-acara-pidana-islam/>

<http://pintuonline.com/artikel/persangkaan-dalam-hukum-acara-peradilan-islam.html>

<http://nisaanwar.blogspot.com/2009/12/tafsir-alat-bukti-qs-al-baqarah224-225.html>

<http://etd.eprints.ums.ac.id/6024/1/C100030198.pdf>

<http://helianakomalasari.wordpress.com/2010/03/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana

<http://Liputan6.com> dengan penambahan dari indonesiaheadline.com dan klip21.com

<http://www.hukumhindu.com/kejahatan-pembunuhan-berencana/>